



## Teknis Perekaman Data dan Penyaluran Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Lubuk Pakam

Suriadi dan Muhammad Aswin Hasibuan\*

Program Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

### Abstrak

Administrasi kependudukan berupa kartu tanda penduduk (KTP) sebagai media untuk dapat mengidentifikasi profil pribadi setiap warga negara, secara terus menerus dalam sistem administrasi pendataan kependudukan di Indonesia bergerak ke arah sistem yang lebih baik meski tidak mudah namun kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dianggap lebih baik. Penelitian yang dilakukan di kantor kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, menjadi tempat perekaman, pendistribusian (E-KTP). Dalam perekaman pendistribusian ditemukan banyaknya kendala-kendala berupa tidak siapnya dan terbatasnya sumber daya manusia termasuk sistem perekaman (E-KTP) yang berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat teknis perekaman data dan penyaluran elektronik kartu tanda penduduk di kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data bersumber pada studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat aparatur yang memiliki pengetahuan minim dalam teknis perekaman dan pendistribusian E-KTP.

**Kata kunci:** Teknis, Perekaman, Kartu Tanda Penduduk

### Abstract

*Population administration in the form of national identity card (KTP) as a medium to be able to identify a personal profile of every citizen, continuously in the system administration data on population in Indonesia move toward a better system, though not easy, but an identity card electronically (e-KTP) is considered better. Research conducted at the office of Lubukpakam Deli Serdang, into a recording, distribution (e-KTP) In recording the distribution found many obstacles in the form of unprepared and limited human resources including recording (e-KTP) based electronics. This study aims to look at the technical data recording and electronic distribution of identity cards in the district Lubukpakam Deli Serdang. This type of research is descriptive qualitative data collection methods rooted in literature and in-depth interviews. These results indicate there are officials who have minimal knowledge in the technical recording and distribution of (e-KTP) card.*

**Keywords:** Technical, Recording, Identity Card

**How to Cite:** Suriadi dan Muhammad A.H. (2013). Teknis Perekaman Data dan Penyaluran Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Lubuk Pakam, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 138-147.

\*Corresponding author:

E-mail: [maswinhasibuanuin@gmail.com](mailto:maswinhasibuanuin@gmail.com)

p-ISSN: 2549 1660

e-ISSN: 2550-1305

## **PENDAHULUAN**

Di tengah perkembangan informasi dan teknologi serta adanya suatu upaya dalam menata dan mengelola sistem kependudukan yang diperankan oleh pemerintah yang berdampak secara efektif maka berbagai langkah-langkah diperlukan oleh pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dalam berbagai bidang termasuk dalam sistem data kependudukan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan segenap tugas maupun kewenangan yang dimiliki haruslah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya terlebih lagi berbagai perkembangan jaman sebagai akibat dari arus globalisasi menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dalam dimensi eksternal negara, pada sisi lain tantangan internal yang dihadapi oleh pemerintah juga begitu multidimensi, dimulai dari laju pertumbuhan ekonomi hingga pada laju pertumbuhan penduduk.

Pada bidang kependudukan, berbagai dimensional permasalahan yang terdapat didalamnya seperti laju pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk, serta sistem data kependudukan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah yang penyelesaiannya bersamaan dengan penyelesaian pada permasalahan dibidang lainnya seperti ekonomi. Persoalan kependudukan memang bukanlah persoalan yang cukup sederhana ditengah jumlah populasi kependudukan yang tersebar diberbagai daerah dalam wilayah Indonesia serta letak geografis Indonesia yang begitu terbuka atau dekat dengan negara tetangga dapat menimbulkan potensi munculnya migran (pendatang) "gelap".

Saat ini sistem data kependudukan dalam dimensi kewenangannya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bukan lagi menjadi kewenangan pemerintahan daerah, penerbitan identitas kependudukan dengan istilah penamaan kartu tanda penduduk (KTP) saat ini di

Indonesia sudah mulai bergeser kepada penggunaan teknologi yang lebih canggih yakni perubahan kartu tanda penduduk menjadi elektronik kartu tanda penduduk. Perubahan ini tentulah memiliki maksud dan tujuan yang lebih baik dari penggunaan media KTP sebelumnya karena melalui elektronik kartu tanda penduduk setiap penduduk memiliki data yang tersimpan secara elektronik di dalam media EKTP masing-masing penduduk.

Penyelenggaraan EKTP oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan teknis serta pendidribusiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah dengan pendekatan struktur membantu pemerintah pusat agar setiap penduduk yang berhak memperoleh EKTP dapat mengakses pembuatan EKTP di setiap kecamatan. Perekaman EKTP dilaksanakan di setiap kantor kecamatan, dengan demikian penelitian ini akan meneliti teknis perekaman data dan penyaluran elektronik kartu tanda penduduk di kecamatan lubuk pakam kabupaten deli serdang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif maka peneliti akan memperhatikan berbagai data dalam teknik kualitatif dan kemudian akan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih dua bulan.

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *Snowballing*, penggunaan teknik ini akan membantu peneliti untuk mendapatkan informan yang relevan terkait topic permasalahan penelitian. Teknik ini akan mengantarkan peneliti dari satu informan ke informan lainnya melalui pertunjuk informan kunci.

Data primer pada penelitian ini berupa data berbentuk tertulis dan tidak tertulis yang di peroleh dari lokasi penelitian seperti dokumen-dokumen data dan data wawancara bersama informan. Data skunder pada penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan berbentuk buku, jurnal, dan perundang-undangan; disamping itu juga penelusuran informasi data melalui media internet turut digunakan untuk memperkuat data skunder pada penelitian ini.

Adapun teknik yang akan digunakan dalam proses pengambilan data adalah: *Library research* (penelitian kepustakaan), Penelitian kepustakaan ini adalah seabagai salah satu cara dalam proses pengambilan data dengan membaca buku-buku, teori-teori, artikel, perundang-undangan, melihat internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. *Field research* (penelitian lapangan), dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk mencari data primer dengan langsung terjun kelapangann dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Penelitian Lapangan ini akan dilakukan dalam beberapa cara, yakni sebagai berikut:

Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau dilokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggunakan dokumentasi untuk menyimpan bukti data-data yang diperoleh peneliti.

Tahap analisis data adalah melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis data ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab bagaimana manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat di desa Blankahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu Kabupaten yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Deli Serdang terus berupaya melakukan pembangunan dalam menuju kesejahteraan masyarakat Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang terletak terletak diantara 20 57 Lintang Utara dan 30 16 Lintang Selatan dan 98033-99027 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72km<sup>2</sup> atau 3,48% luas Propinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur

dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebagai salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk didunia. Kabupaten ini mengelilingi 2 ( dua ) kota Utama di Sumatera Utara <http://www.deliserdangkab.go.id/statis-15-gambaranumum.html>, akses 14 Maret 2014 pkl 14.43 Wib).

Bila akan diperhatikan melalui media peta maka wilayah kabupaten Deli Serdang begitu luas dan terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengapit kabupaten Deli Serdang.

Gambar: 1. Peta Kabupaten Deli Serdang



Sumber :

<http://www.deliserdangkab.go.id/statis-15-gambaranumum.html>, akses 14 Maret 2014 pkl 14.43 Wib

Secara keseluruhan profil geografis kabupaten Deli Serdang dalam hal suhu bisa dikatakan memiliki suhu rata-rata 23,8 derajat celcius, ini menandakan bahwa daerah kabupaten Deli Serdang bukan lah daerah yang terlalu bersuhu panas terlebih lagi pada daerah dekat pegunungan pada

wilayah Kabupaten Deli Serdang seperti kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit yang begitu dekat atau juga telah menjadi bagian dari dataran pegunungan Berastagi. Secara lebih rinci geografis Kabupaten Deli Serdang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Geografis Kabupaten Deli Serdang

Indikator	Satuan	2013
Luas	km2	2.497,72
Letak dpl	m	0-500
Kecepatan Angin	m/detik	1,25
Kelembaban Udara	%	83
Curah Hujan	mm	187
Hari Hujan	hari	17
Suhu Minimum	Derajat celcius	24,0
Suhu Maksimum	Derajat celcius	32,1
Suhu Rata-rata	Derajat celcius	23,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari daerah pantai, daratan rendah dan daratan tinggi pegunungan dengan luas lebih kurang 2.497, 72 Km<sup>2</sup> (lebih kurang 249.772 Ha) terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan (Dokumen Profil Deli Serdang, [www. http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html](http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html), akses 14 Maret 2015, pkl. 15.03 Wib).

Pada tabel di bawah ini akan diperlihatkan luas wilayah kabupaten Deli Serdang menurut kecamatan.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang

Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Rasio terhadap luas kabupaten
Gunung Meriah	76,65	3,07
STM Hulu	223,38	8,94
Sibolangit	179,96	7,20
Kutalimbaru	174,92	7,00
Pancur Batu	122,53	4,91
Namo Rambe	62,30	2,49
Biru-Biru	89,69	3,59
STM Hilir	190,50	7,63
Bangun Purba	129,95	5,20
Galang	7150,29	6,02
Tanjung Morawa	131,75	5,27
Patumbak	46,79	1,87
Deli Tua	9,36	0,37
Sunggal	92,52	3,70
Hampan Perak	230,15	9,21
Labuhan Deli	127,23	5,09
Percut Sei Tuan	190,79	7,64
Batang Kuis	40,34	1,62
Pantai Labu	81,85	3,28
Beringin	52,69	2,11
Lubuk Pakam	31,19	1,25
Pagar Merbau	62,89	2,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Sebagai daerah kabupaten yang sedang berkembang, pemerintah Deli Serdang terus melakukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di berbagai sektor seperti sektor ekonomi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Gunung Meriah	1.326	1.306	2.362
STM Hulu	6.536	6.458	12.994
Sibolangit	10.369	10.387	20.756
Kutalimbaru	18.729	18.966	37.758
Pancur Batu	44.806	44.663	89.469
Namo Rambe	19.089	19.494	38.583
Biru-Biru	18.033	17.854	35.887
STM Hilir	16.394	18.873	32.267
Bangun Purba	11.378	11.371	22.749
Galang	32.619	32.293	64.912
Tanjung Morawa	102.299	100.571	202.870
Patumbak	47.391	46.131	93.522
Deli Tua	31.449	32.428	63.877
Sunggal	129.404	127.666	257.070
Hampan Perak	80.320	77.714	158.034
Labuhan Deli	32.245	31.186	63.431
Percut Sei Tuan	203.794	201.640	405.434
Batang Kuis	30.060	29.221	59.281
Pantai Labu	23.431	22.009	45.440
Beringin	28.024	27.252	55.276
Lubuk Pakam	43.321	43.045	85.366
Pagar Merbau	19.190	19.590	38.780
<b>Kab. Deli Serdang</b>	<b>949.270</b>	<b>937.118</b>	<b>1.886.388</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka dapat berpengaruh terhadap tingginya angka masyarakat yang memerlukan pekerjaan sehingga bisa dikatakan bahwa peningkatan laju pertumbuhan penduduk dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat.

abel 4. Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

Indikator	Satuan	2013
Kepadatan Penduduk	jiwa/km <sup>2</sup>	755
Sex Ratio		101,30
Laju Pertumbuhan Penduduk		2,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

Dari segi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang di peroleh besaran penyerapan anggaran dari target dan realisasi di tahun 2011 sebesar 92, 63 % dan ditahun 2012 sebesar 87, 60 %. Data tersebut memperlihatkan penurunan penyerapan anggaran di APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 ke tahun 2012. Secara lebih rinci diperlihatkan pada patebl berikut:

Tabel 5. Perkembangan APBD dan PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 dan 2012

Perkembangan APBD	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
	2011	1.786.448.175.612,54	1.654.873.747.938,42	92,63%
	2012	2.024.104.940.618,00	1.773.142.380.441,00	87,60%
Perkembangan PAD	2011	241.225.296.440	213.791.544.828,53	88,63%
	2012	390.027.110.293	290.185.339.362,66	74,40%

Sumber: (Dokumen Profil Deli Serdang, <http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html>, akses 14 Maret 2013, pkl. 15.23 Wib)

Tabel di atas memperlihatkan daya penyerapan anggaran pada APBD dan PAD kabupaten Deli Serdang di tahun 2011 mengalami penurunan, hal ini dapat dikarenakan terdapat berbagai program pemerintahan Deli Serdang yang belum terealisasi atau bisa saja lebih dikarenakan ketentuan dalam penggunaan anggaran yang begitu rumit dalam pelaksanaannya. Terkait hal ini perlu penelitian lebih lanjut secara komperhensif dalam menjelaskan hal ini.

Lubuk pakam merupakan salah satu Kecamatan dari 22 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam memiliki 6 Desa dan 7 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 31, 19 Km<sup>2</sup>. (Dokumen Profil Deli Serdang, [www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html](http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html), akses 14 Maret 2013, pkl. 15.40 Wib).

Berikut pada tabel dibawah ini akan diuraikan nama lurah dan kepala desa di Kecamatan Lubuk Pakam.

Tabel 6. Nama Lurah dan Kepala Desa Di Kecamatan Lubuk Pakam

No.	Nama Lurah dan Kepala Desa	Kelurahan	Desa
1	Khairil, ST.	Lubuk Pakam Pekan	-
2	Raden Mewah Ristanto, SSTP.	Lubuk Pakam I-II	-
3	Azizur Rahman	Lubuk Pakam III	-
4	Muhammad Idris	Cemara	-
5	Rio Laka Dewa	Paluh Kemiri	-
6	M. Taufan	Sahmad	-
7	Risma Silaen	Petapahan	-
8	Ardiono	-	Bakaran Batu
9	N a s i r	-	Jati Sari
10	Marihot Siregar	-	Pasar Melintang
11	Jumianto	-	S e k i p
12	Rukidi / Junaidi AP (Plt)	-	Pagar Jati
13	Sutimin	-	Pagar Merbau III

Sumber: Kantor Camat Lubuk Pakam Tahun 2015

Struktur organisasi Kantor Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang berbentuk garis, dimana dengan uraian tugas daripada masing-masing bagian adalah sebagai berikut (Dokumen Kantor Kecamatan Lubuk Pakam).

Tugas Pokok dan Fungsi Camat: Camat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan program dan kegiatan kecamatan; b) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; d) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; e) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; f) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan; g) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan; h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang disebut Sekcam

yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi: a) Menyelenggarakan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; b) Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; c) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kasubbag Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyusun program dan pengelolaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi: a) Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan; b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan; c) Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan.

Tugas dan Fungsi Kasubbag Keuangan, membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi: a) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; b) Pelaksanaan administrasi keuangan kecamatan; c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan

keuangan kecamatan; d) Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi Kasubbag Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, yaitu: a) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kecamatan; b) Pengelolaan kearsipan kecamatan; c) Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai; d) Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, seksi pemerintahan mempunyai fungsi: a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; b) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan; c) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksana kegiatan bidang pemerintahan; d) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Tugas dan Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun tugas pokok dan fungsi seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu: a) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; b) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib; c) Memeriksa, mengecek,

mengoreksi, mengontrol, dan merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas; d) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum; e) Membuat program kerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban; f) Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat; g) Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat; h) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD); i) Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah; j) Membantu Camat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, agar sesuai dengan Peraturan Daerah atau ketentuan yang berlaku; k) Melakukan kegiatan pemantauan terhadap pengembangan potensi dan kualitas Sumber Daya Alam; l) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan; m) Memproses rekomendasi terhadap penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; n) Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; o) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku; p) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; q) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian; r) Memimpin setiap pelaksanaan penertiban yang melanggar Perda; s) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan



Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: a) Menyusun rencana kerja dan program / kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; b) Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas; c) Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau satuan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; d) Fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi satuan kerja pemerintah maupun swasta yang perencanaannya dari dan untuk masyarakat; e) Fasilitasi perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa dan kecamatan serta penyelenggaraan lomba desa; f) Pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemberdayaan masyarakat; g) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok masyarakat; h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat; i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok fungsi Kasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a) Menyusun rencana kerja dan program yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan agama; b) Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, keluarga

berencana, sosial dan agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi vertikal yang terkait dengan pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan agama; d) Memfasilitasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah maupun swasta yang perencanaannya dari dan untuk masyarakat; e) Melaksanakan pengumpulan dan analisis data pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan agama; f) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan; g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah atasan.

Tugas pokok dan fungsi Kasi Kebersihan adalah sebagai berikut: a) Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan; b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi kebersihan; d) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; e) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; f) Melaksanakan pelayanan di bidang kebersihan dan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) Mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebersihan; h) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas petugas kebersihan kecamatan; i) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi kebersihan; j) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan; k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 35 tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Diperlukan (NIK). Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah pada tahun 2010 sampai dengan 2012 melaksanakan 3 (tiga) program strategis di bidang Administrasi Kependudukan yang meliputi Pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan Penerapan E-KTP. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 471.13/2715/SC tanggal 5 Juli 2010 perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, penerbitan NIK dan Penerapan E-KTP. (<http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html>, akses 14 Marer 2015, pkl. 15.36 WIB)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2011 bersama dengan 197 Kabupaten Kota telah melaksanakan program penerapan E-KTP berbasis NIK secara Nasional yang telah berakhir pada bulan April tahun 2012, dan dilanjutkan secara Reguler sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Dari 1.100.335 wajib KTP yang ditarget oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 834.184, masih terdapat ± 266.151 wajib KTP yang belum melakukan perekaman E-KTP. (<http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html>, akses 14 Marer 2015, pkl. 15.36 WIB)

## **SIMPULAN**

Pemerintahan kecamatan sebagai fasilitator pendistribusian E-KTP sudah berusaha secara optimal dalam pelaksanaan pendistribusian namun untuk meningkatkan hal itu di kemudian hari perlu penambahan pengetahuan bagi sumber daya manusia. Perekaman E-KTP dapat lebih maksimal bilamana kepedulian masyarakat dan SDM menguasai pengetahuan tentang perekaman E-KTP. Dalam melaksanakan teknis perekaman

masih diperlukan pelatihan dan pendidikan secara khusus bagi petugas E-KTP kecamatan agar lebih professional. Untuk meningkatkan pemahaman dan berhasilnya perekaman sekaligus pendistribusian diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai tanda bukti penduduk, E-KTP masih ditemukan kurangnya pebdistribusian secara merata, sehingga masih banyak penduduk yang belum memiliki E-KTP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Handoko, T. H. 1992. Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberti.
- Nurcholis, H. 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo: Jakarta
- Poernomo, M. 2004, Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa. Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 1996. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung agung.
- Sinambela, L.P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, S.A. 2002. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Wesha, P. 1992. Kinerja Organisasi. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Wijaya, A.T. 1993. Manajemen Suatu Pengantar. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Dokumen Kantor Camat Lubuk Pakam Tahun 2015
- Dokumen Profil Deli Serdang, [www. http://www.deliserdangkab.go.id/stat is-29-kependudukan.html](http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html), akses 14 Maret 2015, pkl. 15.23 Wib)
- Dokumen Profil Deli Serdang, [www. http://www.deliserdangkab.go.id/stat is-29-kependudukan.html](http://www.deliserdangkab.go.id/statis-29-kependudukan.html), akses 14 Maret 2013, pkl. 15.03 Wib).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia>, akses tanggal 27-12-2013, pkl 20.30 wib